



EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF TIGA RIHIT 'KAMPUNG WARNA WARNI' TOURISM VILLAGE BASED ON THE TEN STEPS OF GREEN TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT

* Agatha Christie Saragi Napitu¹, Femmy Indriany Dalimunthe², Sumihar Sebastiana³

¹⁻³Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Politeknik Pariwisata Medan, Medan, Indonesia, Email: agathachristienapitu@gmail.com

*(Correspondence author)

ABSTRACT

Article History

Submitted:

11 February 2026

Reviewed:

07 March 2026

Accepted:

10 March 2026

Published:

15 May 2026

This study aims to evaluate the development of Kampung Warna Warni Tiga Rihit Tourism Village in Simalungun Regency using the framework of the Ten Steps of Green Tourism Village Development. The research is based on the perspective of sustainable tourism and community-based tourism, which emphasize environmental sustainability, community participation, and equitable economic benefits. A qualitative approach was employed through observation, in-depth interviews with tourism village managers and visitors, and literature review. The evaluation was conducted using the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model to assess the implementation of tourism village development. The findings indicate that several stages of development have been initiated, including

building collective commitment, mapping village potential, preparing human resources, and improving environmental arrangements and supporting facilities. However, these stages have not been implemented comprehensively. In addition, the monitoring and evaluation system has not yet been institutionalized, resulting in limited evidence of economic improvement, community empowerment, environmental conservation, and enhancement of local quality of life. These findings suggest that strengthening participatory governance, capacity development, and systematic monitoring and evaluation is necessary to support the sustainable development of the tourism village.

Keywords: *Tourism village evaluation, green tourism village development, sustainable tourism, community-based tourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Banyak negara dan pemerintah daerah memanfaatkan sektor pariwisata sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah. Namun demikian, di balik kontribusi ekonominya yang signifikan, pengembangan



pariwisata juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kerentanan sosial apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali dapat memicu degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta perubahan sosial budaya dalam masyarakat lokal. Oleh karena itu, wacana pariwisata kontemporer semakin menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial sebagai pilar utama pembangunan pariwisata berkelanjutan (Baloch et al., 2022; Štreimikienė et al., 2020; Volka & Mironova, 2024).

Tantangan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata semakin terlihat ketika suatu destinasi mengalami pertumbuhan yang pesat tanpa didukung oleh perencanaan dan tata kelola yang memadai. Dalam kajian pariwisata, perkembangan suatu destinasi umumnya mengikuti tahapan tertentu yang memengaruhi keberlanjutannya. Model *Tourism Area Life Cycle* (TALC) menjelaskan bahwa destinasi wisata berkembang melalui tahapan eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, hingga stagnasi. Setiap tahap memiliki dinamika dan tekanan yang berbeda, terutama terkait kapasitas lingkungan, pengelolaan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. Apabila tidak diiringi dengan intervensi kebijakan dan strategi keberlanjutan yang tepat, destinasi yang mencapai tahap perkembangan lanjut sering kali menghadapi penurunan kualitas lingkungan dan berkurangnya daya saing destinasi. Oleh sebab itu, integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan siklus perkembangan destinasi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan daya dukung lingkungan (Rodríguez et al., 2008; Lee & Jan, 2019).

Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata berbasis pedesaan atau desa wisata semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif model pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Desa wisata menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta distribusi manfaat pariwisata. Berbeda dengan model pariwisata massal yang sering didominasi oleh investor eksternal, desa wisata berupaya memanfaatkan potensi lokal, budaya, serta sumber daya alam sebagai daya tarik utama yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan karena mampu memperkuat rasa kepemilikan sosial, meningkatkan pemerataan manfaat ekonomi, serta menjaga kelestarian budaya lokal. Berbagai studi menunjukkan bahwa desa wisata yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat dan tata kelola yang baik cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan dibandingkan dengan destinasi yang berkembang tanpa keterlibatan masyarakat secara aktif (Purnomo et al., 2020; Tong et al., 2024; Turčinović et al., 2025).

Desa wisata di Indonesia telah menjadi salah satu instrumen kebijakan penting dalam pembangunan pedesaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pemanfaatan kewenangan desa, organisasi masyarakat, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa wisata diharapkan mampu mendorong diversifikasi ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Meskipun demikian, implementasi program desa wisata di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak desa wisata mengalami keterbatasan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat yang

belum optimal, serta sistem tata kelola yang belum kuat. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kesenjangan antara perencanaan pembangunan pariwisata dan praktik implementasinya di tingkat lokal (Purnomo et al., 2020; Rahman et al., 2025).

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, muncul konsep Desa Wisata Hijau yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangan desa wisata. Pendekatan desa wisata hijau menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelestarian keseimbangan ekologis dalam aktivitas pariwisata. Konsep ini tidak hanya berfokus pada estetika lingkungan atau penghijauan kawasan wisata, tetapi juga mencakup transformasi tata kelola pariwisata menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada efisiensi sumber daya. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam berbagai model pariwisata berkelanjutan di tingkat global yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau, partisipasi komunitas, serta pengelolaan lingkungan secara terpadu untuk menjamin keberlanjutan destinasi wisata (Sookhom et al., 2024; Lu, 2025; Singh et al., 2025).

Namun demikian, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan di tingkat desa memerlukan kerangka pengembangan yang sistematis dan terukur. Literatur mengenai manajemen destinasi berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata yang berhasil umumnya mengikuti tahapan yang terstruktur, mulai dari peningkatan kesadaran, penetapan agenda pembangunan, implementasi program, hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Perencanaan yang terintegrasi, tata kelola kolaboratif, serta sistem monitoring yang adaptif menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata. Penelitian menunjukkan bahwa destinasi yang menerapkan pendekatan perencanaan terintegrasi dan tata kelola kolaboratif memiliki kinerja keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan destinasi yang tidak memiliki sistem evaluasi yang jelas (d'Angella et al., 2025; Lu, 2025; Javdan et al., 2023).

Meskipun perhatian terhadap pengembangan desa wisata berkelanjutan semakin meningkat, kajian empiris yang mengevaluasi implementasi prinsip keberlanjutan di tingkat desa masih relatif terbatas, terutama pada destinasi wisata yang sedang berkembang. Banyak desa wisata telah mengadopsi konsep keberlanjutan secara normatif, tetapi belum memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Akibatnya, sering muncul kesenjangan antara visi pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan praktik pengelolaannya di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan Kampung Warna Warni Tiga Rihit di Kabupaten Simalungun dengan menggunakan kerangka analisis Sepuluh Langkah Pengembangan Desa Wisata Hijau. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip keberlanjutan telah diterapkan dalam aspek tata kelola, partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan produk wisata di kawasan tersebut.

Pemahaman mengenai implementasi prinsip desa wisata hijau di tingkat lokal menjadi penting tidak hanya untuk meningkatkan tata kelola pariwisata di Kampung Warna Warni Tiga Rihit, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran bagi

pengembangan desa wisata lainnya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan desa wisata berkelanjutan yang menekankan pentingnya tata kelola yang sistematis, pemberdayaan masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata pedesaan.

LITERATUR REVIEW

Desa Wisata dalam Perspektif Pariwisata Berkelanjutan

Konsep desa wisata berkembang sebagai pendekatan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan aktivitas wisata dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Dalam pendekatan ini, komunitas tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, serta distribusi manfaat pariwisata. Perspektif tersebut selaras dengan paradigma pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata. Dalam konteks pedesaan, model pengembangan ini sering dipahami melalui kerangka *community-based tourism (CBT)*, yaitu pendekatan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat pengambilan keputusan dan penerima manfaat utama dari aktivitas pariwisata (Wikantiyoso et al., 2021; Marsuki et al., 2025).

Dalam kerangka pariwisata berkelanjutan, desa wisata memiliki potensi untuk mengintegrasikan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pariwisata pedesaan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, serta diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Pada saat yang sama, pengembangan desa wisata juga dapat mendorong pelestarian tradisi, kearifan lokal, serta praktik budaya yang menjadi identitas komunitas. Dari perspektif lingkungan, pariwisata pedesaan yang dikelola secara berkelanjutan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam serta mengelola dampak ekologis dari aktivitas pariwisata (Baloch et al., 2022; Yanan et al., 2024).

Sejumlah studi empiris di berbagai desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi ketiga dimensi keberlanjutan tersebut mampu menghasilkan dampak pembangunan yang positif bagi masyarakat lokal. Pengalaman pengembangan desa wisata di beberapa daerah menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang berbasis pada konservasi sumber daya, pelestarian budaya, serta pemerataan manfaat ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keaslian lingkungan dan identitas budaya lokal. Dalam beberapa kasus, desa wisata bahkan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas (Manaf et al., 2018; Purnomo et al., 2020; Maulani & Fakhrudin, 2025; Ah et al., 2025; Syarifah & Rochani, 2022).

Dalam praktiknya, keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan destinasi. Pendekatan *community-based tourism* menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan pariwisata, mulai dari proses perencanaan, implementasi program, hingga evaluasi kegiatan wisata. Partisipasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan

rasa memiliki terhadap destinasi wisata, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata dapat didistribusikan secara lebih adil kepada masyarakat lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik utama desa wisata (Marsuki et al., 2025; Hanafi, 2024; Syarifah & Rochani, 2022).

Beberapa contoh praktik desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa ketika komunitas lokal menjadi penggerak utama pengembangan destinasi, desa wisata mampu berkembang secara lebih berkelanjutan. Pengalaman pengembangan desa wisata Nglangeran di Yogyakarta menunjukkan bahwa kolaborasi antar organisasi lokal, kelompok pemuda, serta kelompok tani mampu menciptakan model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat upaya konservasi lingkungan serta meningkatkan reputasi destinasi hingga memperoleh pengakuan nasional dan internasional sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Temuan serupa juga ditemukan pada beberapa desa wisata lain yang berhasil mengembangkan potensi lokal melalui keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan pariwisata (Manaf et al., 2018; Wikantiyoso et al., 2021).

Meskipun demikian, implementasi konsep desa wisata berbasis keberlanjutan masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di berbagai daerah sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang memadai. Kelemahan tersebut sering menyebabkan program desa wisata berkembang secara tidak konsisten dan sulit mempertahankan keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengembangan desa wisata masih didominasi oleh pendekatan top-down yang kurang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (Marsuki et al., 2025; Purnomo et al., 2020; Ariyani & Fauzi, 2023).

Tantangan lain yang sering muncul dalam pengembangan desa wisata berkaitan dengan keterbatasan keterampilan masyarakat dalam mengelola produk wisata, memasarkan destinasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi pariwisata. Studi mengenai pengelolaan sumber daya manusia di sektor pariwisata pedesaan menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital, kemampuan pemasaran, serta manajemen usaha wisata menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing desa wisata di tingkat regional maupun global (Harsanto, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan kelembagaan lokal menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan desa wisata.

Selain aspek kapasitas masyarakat, kualitas tata kelola destinasi juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata. Penelitian mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan destinasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan di tingkat desa. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata memerlukan pendekatan tata kelola yang partisipatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial maupun ekonomi masyarakat lokal (Gede et al., 2024; Zhang et al., 2024).

Dengan demikian, desa wisata dapat dipahami sebagai model pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Integrasi antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal menjadi fondasi utama dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi model ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola destinasi, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan institusi lokal dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan inovasi pariwisata secara berkelanjutan.

Konsep Desa Wisata Hijau dalam Perspektif *Green Governance*

Konsep Desa Wisata Hijau dapat dipahami sebagai bentuk penerapan green governance dalam pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal. Pendekatan ini mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam satu kerangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, keberhasilan suatu destinasi tidak hanya ditentukan oleh atribut fisik yang ramah lingkungan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Literatur mengenai sustainable tourism governance menekankan bahwa keberlanjutan destinasi sangat dipengaruhi oleh karakter tata kelola yang demokratis, kolaboratif, dan berbasis institusi yang kuat. Tata kelola tersebut harus mampu memfasilitasi interaksi antar pemangku kepentingan, mengelola potensi konflik kepentingan, serta mengintegrasikan berbagai tujuan pembangunan dalam kerangka keberlanjutan yang konsisten (Bramwell & Lane, 2011; Bramwell & Lane, 2013). Dengan demikian, konsep Desa Wisata Hijau tidak sekadar menekankan aspek “hijau” secara simbolik, tetapi juga mencerminkan upaya membangun sistem pengelolaan destinasi yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Kajian terbaru mengenai tata kelola pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi yang efektif umumnya mencakup tiga dimensi utama, yaitu manajemen destinasi (destination management), interaksi antar pemangku kepentingan, serta kapasitas institusi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan maupun sosial (Ginting et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan program pengembangan Desa Wisata Hijau yang menekankan penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dan produk wisata, pembangunan kemitraan, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan (Putri et al., 2025; Hanifah et al., 2024; Ah et al., 2025).

Dalam kerangka green governance, pembelajaran kebijakan (policy learning) juga menjadi komponen penting dalam memastikan keberlanjutan tata kelola destinasi. Kebijakan pariwisata berkelanjutan sering mengalami kegagalan ketika perubahan yang dilakukan hanya bersifat teknis tanpa mengubah paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan semata. Oleh karena itu, proses evaluasi dan pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan diperlukan agar pengelolaan destinasi dapat beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Hall, 2011; Bramwell & Lane, 2013).

Instrumen kebijakan seperti indikator keberlanjutan, sistem penilaian destinasi, serta berbagai bentuk eco-label juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola pariwisata berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai alat pengukuran teknis, indikator tersebut juga

menjadi sarana legitimasi komitmen keberlanjutan serta mekanisme pembelajaran sosial bagi para pemangku kepentingan (Gasparini & Mariotti, 2021). Dalam konteks desa wisata, penerapan standar atau label hijau dapat membantu memastikan konsistensi pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola destinasi.

Penerapan prinsip tata kelola hijau dalam desa wisata di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perencanaan pengelolaan lingkungan, kapasitas kelembagaan, serta penguatan sistem evaluasi. Penelitian mengenai green cost management di Desa Wisata Senaru menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan biaya lingkungan, indikator kinerja ekologis, serta dokumen perencanaan jangka panjang, upaya pengembangan desa wisata berkelanjutan cenderung sulit dipertahankan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata memerlukan perencanaan strategis berbasis prinsip triple bottom line, yaitu integrasi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan yang terpadu (Putri et al., 2025).

Selain itu, praktik good governance dan collaborative governance di tingkat desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, transparansi pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya terbukti mampu memperkuat akuntabilitas serta keberlanjutan pengelolaan destinasi (Aryadi, 2022; Hanifah et al., 2024). Lebih jauh lagi, pendekatan tata kelola multi-level yang melibatkan jejaring publik, swasta, dan komunitas juga menjadi elemen penting dalam praktik green governance modern, termasuk melalui pemanfaatan teknologi untuk pemantauan lingkungan dan penguatan partisipasi masyarakat (Errichiello & Micera, 2021; Zhang et al., 2024; Guo & Li, 2025; Mandić & Kennell, 2021).

Dengan demikian, Desa Wisata Hijau dapat dipahami sebagai model pengembangan destinasi yang mengintegrasikan prinsip green governance dalam praktik pengelolaan pariwisata di tingkat lokal. Model ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, pengelolaan lingkungan yang terencana, partisipasi masyarakat yang inklusif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Evaluasi Pengembangan Desa Wisata dan Pendekatan Adaptive Governance

Evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan pengembangan desa wisata. Dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil akhir program, tetapi juga untuk memahami kesesuaian perencanaan, kesiapan sumber daya, kualitas implementasi, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan. Salah satu pendekatan evaluasi yang banyak digunakan dalam kajian program pembangunan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif karena menilai program secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga dampak yang dihasilkan (Alanshori et al., 2025).

Dalam konteks pengembangan desa wisata, komponen context berfokus pada kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa desa wisata dikembangkan berdasarkan potensi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat setempat. Penelitian tentang evaluasi program pariwisata menunjukkan bahwa analisis konteks mampu mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi lokal (Rohid et al., 2025; Julianto & Siregar, 2025).

Komponen input berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pengembangan desa wisata, termasuk kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dukungan pendanaan, infrastruktur pariwisata, serta jejaring kemitraan. Studi evaluasi pada berbagai destinasi wisata pedesaan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi lokal, dukungan pemerintah, serta ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan (Rohid et al., 2025; Julianto & Siregar, 2025).

Sementara itu, komponen process menilai kualitas implementasi program, termasuk koordinasi antaraktor, mekanisme pengelolaan kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian mengenai evaluasi program pengembangan destinasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan wisata berbasis komunitas (Rohid et al., 2025; Sutomo et al., 2025).

Komponen terakhir, yaitu product, mengevaluasi hasil dan dampak yang dihasilkan oleh program desa wisata. Dampak tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah wisatawan atau pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta perlindungan lingkungan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa model CIPP mampu mengidentifikasi keberhasilan program dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai budaya lokal, sekaligus mengungkap berbagai kelemahan seperti keterbatasan pemasaran, fasilitas wisata, dan keberlanjutan pendampingan program (Julianto & Siregar, 2025; Rohid et al., 2025; Risdawati & Hermansah, 2023).

Selain menggunakan kerangka evaluasi program seperti CIPP, pengelolaan desa wisata juga perlu dipahami melalui perspektif adaptive governance. Pendekatan ini memandang destinasi wisata sebagai sistem sosial-ekologis yang kompleks yang harus mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar, dinamika lingkungan, serta perkembangan sosial masyarakat (Hartman, 2021; Sharpley, 2022). Dalam pendekatan ini, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran berkelanjutan bagi pengelola destinasi.

Literatur tentang tata kelola pariwisata menunjukkan bahwa sistem adaptive governance menekankan proses pembelajaran berulang melalui monitoring berkelanjutan, refleksi kebijakan, serta penyesuaian strategi pengelolaan destinasi (Islam et al., 2017; Islam et al., 2018). Pendekatan ini memungkinkan pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi lokal—untuk secara kolektif menyesuaikan kebijakan dan praktik pengelolaan sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Dalam konteks desa wisata, evaluasi yang berbasis pembelajaran adaptif terbukti mampu memperkuat koordinasi multiaktor, meningkatkan inovasi produk wisata, serta memperbaiki efektivitas kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sadat & Lawelai, 2025; Sutomo et al., 2025; Zhang et al., 2024). Sebaliknya, destinasi yang tidak memiliki mekanisme evaluasi adaptif cenderung mengalami stagnasi dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan dalam siklus perkembangan pariwisata (Mancini et al., 2020; Gao et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi antara model evaluasi CIPP dan prinsip adaptive governance memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dan meningkatkan kinerja pengembangan desa wisata. Model CIPP menyediakan struktur evaluasi yang sistematis terhadap konteks, sumber daya, proses, dan hasil program, sementara adaptive governance memastikan bahwa hasil evaluasi tersebut digunakan

sebagai dasar pembelajaran kolektif dan penyesuaian kebijakan menuju keberlanjutan destinasi wisata berbasis komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif untuk mengevaluasi implementasi Sepuluh Langkah Pengembangan Desa Wisata Hijau di Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit, Kabupaten Simalungun. Penelitian dilaksanakan pada periode Agustus hingga Oktober 2023.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa Kampung Warna Warni Tiga Rihit merupakan pilot project desa wisata di Kabupaten Simalungun, berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, serta telah menerima berbagai intervensi program pemerintah namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan keberlanjutan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan utama meliputi pengurus Pokdarwis, pengelola homestay, pemerintah desa/kelurahan terkait, serta wisatawan yang menginap di homestay Kampung Warna Warni Tiga Rihit. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu proses wawancara dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan, sarana prasarana, aktivitas wisata, serta praktik pengelolaan desa wisata. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara berbasis indikator Sepuluh Langkah Pengembangan Desa Wisata Hijau. Selain itu, dokumentasi berupa foto lapangan, arsip desa, Surat Keputusan penetapan desa wisata, dokumen Pokdarwis, dan laporan program terkait juga dianalisis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, artikel jurnal ilmiah, serta regulasi yang relevan dengan pariwisata berkelanjutan dan desa wisata.

Sumber data terdiri atas data primer, yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, dokumen pemerintah, dan laporan program pengembangan desa wisata.

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang mencakup proses reduksi data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator sepuluh langkah desa wisata hijau, penyajian data dalam bentuk tabel evaluasi dan narasi tematik, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan temuan lapangan terhadap konsep pengembangan desa wisata hijau.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengonfirmasi temuan kepada beberapa informan kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sepuluh tahapan pengembangan desa wisata hijau, digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting pengembangan Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit. Adapun indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kondisi eksisting sebagai berikut

No	Tahapan	Indikator Tahapan	Desa wisata Tiga Rihit			
			Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan		
1	Membangun komitmen bersama	Melakukan pertemuan dengan kelompok kecil	√			
		Meminta masukan dari pihak pihak yang kompeten		√		
		Mengorganisir musyawarah desa	√			
2	Memetakan potensi dan permasalahan desa	Membuat kesepakatan Bersama	√			
		Melibatkan pemerintah daerah	√			
		Melakukan observasi lapangan dan membuat daftar aspek-aspek observasi	√			
		Mengidentifikasi potensi Pasar		√		
		Mengidentifikasi potensi dampak		√		
		Mengidentifikasi kerawanan bencana		√		
		Mengidentifikasi kelembagaan yang sudah ada	√			
3	Membentuk dan memperkuat kelembagaan	Melakukan pemetaan para pemangku kepentingan desa wisata yang akan dibentuk	√			
		Rumuskan bentuk/model/Lembaga/organisasi yang akan ditetapkan	√			
		Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Lembaga/organisasi yang dipilih	√			
		Susun dan tetapkan struktur organisasi	√			
		Legalisasi Lembaga pengelola desa wisata	√			
		4	Menyusun visi, misi dan rencana kerja	Formulasikan visi dan misi pengembangan Desa Wisata Hijau	√	
				Susun rencana kerja dan anggaran	√	

No	Tahapan	Indikator Tahapan	Desa wisata Tiga Rihit Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
5	Mempersiapkan SDM desa	Menyiapkan prosedur dan aturan main	√	
		Melakukan penilaian awal terhadap pemahaman, pengetahuan, keterampilan kepariwisataan		√
		Mengidentifikasi kapasitas SDM yang merupakan prioritas		√
		Mengkonsultasikan dengan Dinas pariwisata tentang penguatan kapasitas SDM		√
		Menyusun program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, magang, dll	√	
		Menyusun program peningkatan kapasitas SDM desa wisata dengan menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk dijadikan lokasi KKN/program pengabdian Masyarakat	√	
		Menyusun program peningkatan kapasitas SDM desa wisata dengan melibatkan professional atau konsultan pariwisata untuk memberikan pendampingan		√
6	Menata lingkungan, sarana dan prasarana	Menyusun rencana pengembangan sederhana desa wisata dengan berdiskusi dengan pemerintah desa, tokoh Masyarakat dan pemilik lahan		√
		Memprioritaskan penataan lingkungan di area yang menjadi pintu masuk wisatawan ke desa wisata dan penyediaan fasilitas umum	√	
		Melakukan musyawarah dan Kerjasama dengan perangkat desa untuk dapat mengakses penggunaan dana desa untuk menyediakan saran dan prasarana prioritas		√
		Melakukan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang ada		√
7	Memformulasikan branding desa	Mengidentifikasi keunggulan desa	√	
		Melakukan perancangan identitas desa	√	
		Melakukan peluncuran dan pengenalan brand	√	
		Melakukan upaya untuk merealisasikan	√	

No	Tahapan	Indikator Tahapan	Desa wisata Tiga Rihit Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
8	Menyusun paket wisata	Membuat daftar sumber daya potensial di desa yang sudah dipetakan Menyusun beberapa alternatif rute (alur) perjalanan yang merangkai objek/merangkai Tentukan juga tema paket yang ditawarkan Menyusun jadwal pelaksanaan untuk masing-masing paket Menyiapkan cerita (<i>story telling</i>) untuk menambah rasa ingin tahu dan memberikan pengalaman yang mendalam bagi wisatawan Membuat perhitungan biaya yang harus dikeluarkan	√ √ √ √ √ √	
9	Melakukan pemasaran kemitraan	Proses dan Strategi Pemasaran Menyiapkan produk seperti lingkungan, atraksi, daya tarik, fasilitas sarana dan prasarana pendukung, paket dan aktivitas wisata, melibatkan pelaku industry pariwisata Menyiapkan materi promosi seperti story telling, foto berkualitas, narasi, brosur/leaflet (pdf) Melakukan promosi membuat dan mengoptimalkan Google My Business (GMB) Melakukan promosi dengan membuat dan mengoptimalkan konten di website Melakukan promosi dengan mengoptimalkan media social seperti : <i>Facebook, Instagram, Twitter</i> dan TikTok. (hanya Instagram) Melakukan promosi dengan menjalin kemitraan dengan komunitas seperti : komunitas fotografer, travel blogger, travel vlogger, instagrammer, maupun dengan konsep B2B seperti <i>market place, e-money</i> dan <i>Fintech</i> (pada tahun 2022) Melakukan promosi dengan melakukan Kerjasama dengan <i>online travel agent</i> seperti : Traveloka, tiket.com, blibli.com,dll Pemerintah memfasilitasi pengadaan sarana, prasarana	√ √ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √

No	Tahapan	Indikator Tahapan	Desa wisata Tiga Rihit	
			Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
		pendukung, pengembangan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, promosi dan peraturan pendukung Swasta memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM, Kerjasama dalam program pengembangan desa wisata melalui tanggungjawan social Perusahaan (CSR)	√	
		Akademisi dan Masyarakat memfasilitasi penelitian dan KKN, pendampingan dan perencanaan dan pengembangan desa wisata	√	
		Melibatkan Masyarakat miskin sebagai pemilik bisnis, pemasok, tenaga kerja, distributor dan konsumen	√	
		Menciptakan manfaat dengan memastikan kelestarian fungsi ekonomi, social dan ekologis	√	
		Mendatangkan keuntungan bagi Masyarakat miskin berupa kesempatan kerja, peluang bisnis, peningkatan pendapatan, keterampilan, kapasitas lokal	√	
		Menguntungkan Perusahaan yang menjalankannya dalam manajemen resiko, operasi, reputasi dan finansial		√
		Mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)	√	
10	Melakukan pemantauan dan evaluasi	Menentukan waktu pelaksanaan, metode evaluasi dan idikator yang ingin dicapai		√
		Mengumpulkan data dan informasi sesuai tujuan evaluasi (jumlah kunjungan, persepsi wisatawan, hasil penjualan dan kondisi lingkungan)		√
		Melakukan pertemuan rutin dengan perangkat desa, perwakilan Masyarakat dan instansi terkait		√
		Melibatkan institusi Pendidikan atau LSM untuk melakukan evaluasi		√
		Menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka kepada		√

No	Tahapan	Indikator Tahapan	Desa wisata Tiga Rihit Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan
		Masyarakat desa dan pihak terkait Menindaklanjuti rekomendasi dari evaluasi untuk perbaikan dan inovasi		√

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat, perencanaan berbasis data, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif pariwisata berkelanjutan, pembangunan destinasi harus menjaga keseimbangan antara dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi agar keberlanjutan jangka panjang dapat tercapai (United Nations World Tourism Organization [UNWTO], 2018). Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa pengembangan pariwisata yang tidak memperhatikan keseimbangan ketiga dimensi tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal (Baloch et al., 2022; Volka & Mironova, 2024).

Dalam konteks desa wisata, konsep pembangunan berbasis komunitas menjadi pendekatan utama yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata. Pendekatan *community-based tourism* (CBT) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap awal pengembangan destinasi merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal (Marsuki et al., 2025; Wikantiyoso et al., 2021; Syarifah & Rochani, 2022). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal pembentukan Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit belum terdapat pelibatan masyarakat secara luas maupun keterlibatan pihak yang memiliki kompetensi dalam pengembangan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas.

Dalam perspektif teori partisipasi, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang masih berada pada tingkat simbolik atau terbatas. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi yang bersifat terbatas hanya berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat belum memiliki kontrol nyata terhadap proses pembangunan. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi tentang pengembangan desa wisata di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang tidak optimal sering menjadi salah satu faktor penghambat keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas (Purnomo et al., 2020; Ariyani & Fauzi, 2023). Penelitian pada beberapa desa wisata juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang kuat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap destinasi wisata serta memperkuat keberlanjutan pengelolaannya (Manaf et al., 2018; Maulani & Fakhruddin, 2025; Hanafi, 2024).

Ketiadaan pemetaan potensi dan permasalahan secara komprehensif pada tahap awal pembentukan desa wisata menunjukkan bahwa analisis konteks sebagaimana ditekankan dalam model evaluasi CIPP belum dilaksanakan secara optimal. Dalam model ini, analisis konteks merupakan tahap penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta tantangan yang dihadapi sebelum program pengembangan dilaksanakan (Stufflebeam, 2003). Penelitian evaluasi program pengembangan destinasi wisata juga

menunjukkan bahwa analisis konteks yang baik mampu meningkatkan kualitas perencanaan serta efektivitas implementasi program pembangunan berbasis masyarakat (Rohid et al., 2025; Julianto & Siregar, 2025).

Meskipun demikian, setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan desa wisata, Pokdarwis mulai melakukan konsolidasi kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi, visi dan misi, serta standar operasional prosedur. Langkah ini menunjukkan adanya upaya menuju tata kelola destinasi yang lebih formal dan terstruktur. Dalam perspektif Tourism Area Life Cycle, kondisi ini mencerminkan tahap awal pengembangan destinasi yang masih memerlukan konsolidasi kelembagaan serta penguatan organisasi lokal (Butler, 1980). Butler menjelaskan bahwa pada fase awal pengembangan destinasi, pembentukan organisasi lokal dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi pada tahap perkembangan selanjutnya.

Namun demikian, dinamika pergantian kepemimpinan Pokdarwis pada tahap awal pengembangan menunjukkan bahwa stabilitas kelembagaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan desa wisata. Literatur tentang tata kelola pariwisata berkelanjutan menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang mampu mengelola interaksi antar pemangku kepentingan secara kolaboratif dan adaptif (Bramwell & Lane, 2011; Ginting et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan desa wisata.

Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, tidak dilakukannya asesmen kebutuhan kompetensi menunjukkan bahwa program peningkatan kapasitas belum dirancang secara sistematis. Padahal, penelitian mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor pariwisata pedesaan menunjukkan bahwa keterbatasan keterampilan manajemen destinasi, pemasaran, serta pengelolaan produk wisata merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan desa wisata (Harsanto, 2025). Tanpa analisis kebutuhan pelatihan yang jelas, program peningkatan kapasitas berpotensi tidak mampu menjawab kebutuhan nyata pengelola destinasi.

Dalam perspektif tata kelola adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi. Pendekatan adaptive governance menekankan pentingnya mekanisme pembelajaran berulang, monitoring berkelanjutan, serta penyesuaian strategi pengelolaan destinasi berdasarkan pengalaman implementasi (Islam et al., 2017; Hartman, 2021). Pendekatan ini memungkinkan sistem sosial-ekologis dalam destinasi wisata untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan, dinamika pasar, maupun perkembangan sosial masyarakat.

Pada aspek pengembangan produk wisata, penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan lingkungan, penyusunan branding, serta pengembangan paket wisata telah dilakukan oleh pengelola desa wisata. Namun demikian, fakta bahwa paket wisata yang telah disusun belum berhasil dipasarkan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain produk wisata dan kebutuhan pasar. Dalam literatur pengembangan destinasi berkelanjutan, keberhasilan produk wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan destinasi dalam mengintegrasikan potensi lokal dengan strategi pemasaran dan diferensiasi produk yang jelas (Bramwell & Lane, 2011). Tanpa segmentasi pasar dan pengembangan produk yang berbasis kebutuhan wisatawan, branding destinasi berpotensi tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Aspek yang paling krusial dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit adalah belum dilaksanakannya sistem monitoring dan evaluasi secara sistematis. Dalam kerangka evaluasi program, model CIPP menegaskan bahwa evaluasi proses dan produk merupakan komponen penting untuk menilai efektivitas implementasi program serta dampak yang dihasilkan (Stufflebeam, 2003). Tanpa sistem evaluasi yang jelas, pengelola desa wisata tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengukur keberhasilan program maupun melakukan perbaikan kebijakan secara adaptif.

Penelitian tentang tata kelola destinasi juga menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari sistem tata kelola pariwisata yang adaptif dan kolaboratif (Zhang et al., 2024). Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran kolektif yang memungkinkan pemangku kepentingan menyesuaikan strategi pengelolaan destinasi sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Secara keseluruhan, implementasi sepuluh langkah pengembangan Desa Wisata Hijau di Kampung Warna Warni Tiga Rihit menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan telah mulai terbentuk melalui pembentukan organisasi Pokdarwis serta penyusunan kerangka tata kelola dasar. Namun demikian, prinsip partisipasi masyarakat yang substantif, pembelajaran adaptif, serta sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam praktik pengelolaan destinasi. Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi berbasis model CIPP serta penerapan prinsip adaptive governance menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang pengembangan desa wisata tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengembangan Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola pariwisata berkelanjutan. Meskipun telah terdapat upaya pengembangan melalui pembentukan kelembagaan Pokdarwis, penyusunan struktur organisasi, penataan lingkungan, serta pengembangan branding dan paket wisata, beberapa aspek penting dalam kerangka pengelolaan desa wisata masih belum berjalan secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan awal pengembangan desa wisata belum didukung oleh pemetaan potensi dan permasalahan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa analisis konteks sebagaimana ditekankan dalam model evaluasi CIPP belum diterapkan secara sistematis, sehingga dasar perencanaan pengembangan destinasi masih relatif lemah.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap awal pembentukan desa wisata juga masih terbatas. Keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya bersifat substantif dan lebih banyak terjadi pada tahap implementasi setelah desa wisata ditetapkan secara formal. Dalam perspektif pengembangan pariwisata berbasis komunitas, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip community-based tourism belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa kepemilikan masyarakat terhadap destinasi wisata serta menjaga keberlanjutan pengelolaannya.

Pada aspek kelembagaan, pembentukan Pokdarwis dan penyusunan perangkat organisasi menunjukkan adanya langkah awal menuju tata kelola destinasi yang lebih terstruktur. Namun demikian, dinamika pergantian kepemimpinan serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini juga terlihat dari belum dilakukannya asesmen kebutuhan kompetensi secara sistematis dalam program pengembangan sumber daya manusia. Akibatnya, kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas belum sepenuhnya terarah pada kebutuhan nyata pengelola destinasi.

Pada aspek pengembangan produk wisata, berbagai upaya seperti penataan lingkungan, penyusunan branding destinasi, dan pengembangan paket wisata telah dilakukan oleh pengelola desa wisata. Namun demikian, belum terjualnya paket wisata yang telah disusun menunjukkan adanya kesenjangan antara desain produk wisata dengan kebutuhan pasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi pengembangan produk dan pemasaran destinasi masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal segmentasi pasar, diferensiasi produk wisata, serta pemanfaatan jaringan kemitraan dalam industri pariwisata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aspek monitoring dan evaluasi merupakan kelemahan paling signifikan dalam pengelolaan desa wisata. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, maupun dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengembangan desa wisata. Padahal, evaluasi merupakan komponen penting dalam kerangka tata kelola destinasi yang adaptif karena memungkinkan pengelola destinasi melakukan pembelajaran berkelanjutan serta penyesuaian strategi pengembangan berdasarkan pengalaman implementasi program.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengembangan desa wisata. Pertama, perencanaan pengembangan desa wisata perlu didasarkan pada pemetaan potensi, analisis kebutuhan masyarakat, serta identifikasi daya dukung lingkungan secara lebih komprehensif agar strategi pengembangan destinasi lebih berbasis data dan konteks lokal. Kedua, penguatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan transparan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan destinasi. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dirancang secara sistematis melalui asesmen kebutuhan kompetensi dan program pelatihan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang manajemen destinasi, pengembangan produk wisata, dan pemasaran digital.

Selain itu, pengembangan produk wisata perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar melalui pendekatan berbasis pengalaman wisata yang memanfaatkan potensi budaya, aktivitas masyarakat, serta karakteristik lingkungan desa. Strategi pemasaran juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan media digital dan pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata. Terakhir, penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Penerapan sistem evaluasi yang terstruktur memungkinkan pengelola destinasi menilai efektivitas program secara objektif sekaligus menjadi sarana pembelajaran kolektif

dalam meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas. Dengan memperkuat aspek perencanaan, partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, pengembangan produk wisata, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan, Desa Wisata Kampung Warna Warni Tiga Rihit memiliki peluang untuk berkembang menjadi destinasi wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Ah, C., Tk, P., & F, G. (2025). Crafting sustainable destinations: Integrative models from Desa Wisata Sambirejo, Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Journalism and Media Management*. <https://doi.org/10.61440/jjmm.2025.v1.14>
- Alanshori, M., Maulidi, A., Zahidi, S., Kusaeri, K., & Suparto, S. (2025). The application of the CIPP evaluation model in educational programs in Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7390>
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2023). Pathways toward the transformation of sustainable rural tourism management in Central Java, Indonesia. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su15032592>
- Baloch, Q., Shah, S., Iqbal, N., Sheeraz, M., AsadUllah, M., Mahar, S., & Khan, A. (2022). Impact of tourism development upon environmental sustainability: A suggested framework for sustainable ecotourism. *Environmental Science and Pollution Research International*, 30, 5917–5930. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-22496-w>
- Cvijanović, D., Karabašević, D., Vujko, A., Vukotić, S., Popović, G., & Mirčetić, V. (2025). The future is community-led: Rethinking rural tourism sustainability through the Bregenzerwald model. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su17125450>
- d'Angella, F., Maccioni, S., & De Carlo, M. (2025). Exploring destination sustainable development strategies: Triggers and levels of maturity. *Sustainable Futures*. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100515>
- Gao, C., Xia, S., Liu, J., Tao, H., & Zhu, Z. (2024). Adaptive evolution and dynamic mechanism of resort socioecological system in tourism cities: The case of Qinhuangdao, China. *Habitat International*. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103138>
- Gede, I., Nugraha, P., Putu, I., Parma, G., Dian, M., Agustina, P., & Hutnaleontina, P. (2024). The role of government and community participation in realizing sustainable tourism development in Tihingan Village, Bali, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.4621>
- Hanafi, M. (2024). Community based tourism dalam pengembangan desa wisata di Magelang. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v21i1.72745>

- Harsanto, B. (2025). Managing human resource in the rural tourism sector: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2493312>
- Hartman, S. (2021). Destination governance in times of change: A complex adaptive systems perspective to improve tourism destination development. *Journal of Tourism Futures*. <https://doi.org/10.1108/jtf-11-2020-0213>
- Islam, M., Islam, M., Ruhanen, L., & Ritchie, B. (2017). Adaptive co-management: A novel approach to tourism destination governance? *Journal of Hospitality and Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.10.009>
- Islam, M., Ruhanen, L., & Ritchie, B. (2018). Tourism governance in protected areas: Investigating the application of the adaptive co-management approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 26, 1890–1908. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1526291>
- Javdan, M., Ghalehtemouri, K., Ghasemi, M., & Riazi, A. (2023). A novel framework for social life cycle assessment to achieve sustainable cultural tourism destinations. *Turyzm/Tourism*. <https://doi.org/10.18778/0867-5856.33.2.01>
- Julianto, A., & Siregar, N. (2025). Studi evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui industri tenun di Desa Wisata Gamplong. *YASIN*. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.7750>
- Lee, T., & Jan, F. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Lu, B. (2025). Sustainable tourism management: Balancing economic growth and environmental preservation. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n05.pe06587>
- Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su10072142>
- Mancini, F., Leyshon, B., Manson, F., Coghill, G., & Lusseau, D. (2020). Monitoring tourists' specialisation and implementing adaptive governance is necessary to avoid failure of the wildlife tourism commons. *Tourism Management*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104160>
- Marsuki, N., Manda, D., Kamaruddin, S., Asrifan, A., Riswandy, N., & M. (2025). Constructing sustainable community-based tourism: Institutional challenges and local empowerment in Gowa Regency, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2025.7.4.7>
- Matović, S., Obradović, S., & Gajić, T. (2025). Sustainable tourism in protected areas: Comparative governance and lessons from Tara and Triglav National Parks. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su17157048>
- Maulani, A., & Fakhruddin, F. (2025). Partisipasi masyarakat pada community based tourism di Desa Wisata Giyanti Kabupaten Wonosobo. *KREATIF: Jurnal*

Pengabdian Masyarakat Nusantara.
<https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.7169>

- Paunović, I., Dressler, M., Nikolić, T., & Pantić, S. (2020). Developing a competitive and sustainable destination of the future: Clusters and predictors of successful national-level destination governance across destination life-cycle. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12104066>
- Purnomo, S., Rahayu, E., Riani, A., Suminah, S., & Udin, U. (2020). Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7, 261–270. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261>
- Rahman, A., Pradana, A., & Rakhma, N. (2025). Sustainable tourism development in Glawan Village: Balancing infrastructure growth and environment through local governance. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1537. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012001>
- Risdawati, R., & Hermansah, T. (2023). The impact of local potential-based community empowerment through the tourism village program in Cikolelet Village, Cinangka District, Serang-Banten Regency. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.13079>
- Rodríguez, J., Parra-López, E., & Yanes-Estévez, V. (2008). The sustainability of island destinations: Tourism area life cycle and teleological perspectives. The case of Tenerife. *Tourism Management*, 29, 53–65. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.04.007>
- Sadat, A., & Lawelai, H. (2025). Optimizing sustainable tourism governance and its impact on employment opportunities through a dynamic governance approach. *Journal of Information Systems Engineering and Management*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i27s.4756>
- Sharpley, R. (2022). Sustainable tourism governance: Local or global? *Tourism Recreation Research*, 48, 809–812. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2040295>
- Singh, S., Gopal, N., John, S., Xavier, H., L., & Kumar, S. (2025). Sustainable tourism practices: Balancing economic growth and environmental conservation. *Journal of Information Systems Engineering and Management*. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i4.9751>
- Sookhom, A., Krivart, K., Jansiri, N., Sookhom, A., Chanasit, J., Pathak, S., & Mallongi, A. (2024). The new way of tourism in green economy style for sustainable community development and empowerment. *HighTech and Innovation Journal*. <https://doi.org/10.28991/hij-2024-05-04-015>
- Sutomo, Y., Sianipar, C., Onitsuka, K., & Hoshino, S. (2025). Evaluating policy environment for community-based rural tourism: Multi-actor perspectives in tourism value chain. *Journal of Regional and City Planning*. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2024.35.3.3>
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi literatur: Pengembangan desa wisata melalui community based tourism untuk kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983>

- Tong, J., Li, Y., & Yang, Y. (2024). System construction, tourism empowerment, and community participation: The sustainable way of rural tourism development. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16010422>
- Turčinović, M., Vujko, A., & Stanišić, N. (2025). Community-led sustainable tourism in rural areas: Enhancing wine tourism destination competitiveness and local empowerment. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su17072878>
- Volka, A., & Mironova, J. (2024). Sustainable tourism: Balancing economic, socio-cultural, and environmental impacts. *Information Technologies and Management*. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-459-7-99>
- Wikantiyoso, R., Cahyaningsih, D., Sulaksono, A., Widayati, S., Poerwoningsih, D., & Triyosoputri, E. (2021). Development of sustainable community-based tourism in Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*. https://doi.org/10.14246/irspsd.9.1_64
- Yanan, L., Ismail, M., & Aminuddin, A. (2024). How has rural tourism influenced the sustainable development of traditional villages? A systematic literature review. *Heliyon*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25627>
- Zhang, F., Lv, Y., & Sarker, M. (2024). Resilience and recovery: A systematic review of tourism governance strategies in disaster-affected regions. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104350>
- Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Jasinskas, E., & Simanavicius, A. (2020). Sustainable tourism development and competitiveness: The systematic literature review. *Sustainable Development*, 29, 259–271. <https://doi.org/10.1002/sd.2133>

BIOGRAFI PENULIS

Agatha Christie Saragi Napitu, Akademisi di Magister Terapan Perencanaan & Pengembangan Pariwisata, Politeknik Pariwisata Medan, fokus pada perencanaan destinasi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Email: agathachristienapitu@gmail.com.

Femmy Indriany Dalimunthe, Dosen Magister Terapan Perencanaan & Pengembangan Pariwisata, Politeknik Pariwisata Medan, tertarik pada kajian tata kelola pariwisata dan strategi pemasaran destinasi. Email: femmydalimunthe@gmail.com.

Sumihar Sebastiana, Dosen Magister Terapan Perencanaan & Pengembangan Pariwisata, Politeknik Pariwisata Medan, dengan penelitian pada inovasi destinasi dan pengembangan wisata lokal. Email: sumiharsebastiana2@gmail.com.